

Partai-Partai Islam

Transformasi Gerakan Islam

dan Ruang Demokrasi

Prof. Dr. Taufiq Abdullah, pernah berkomentar dengan nada bertanya ketika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diwa-jibkan untuk menggantikan asas Islam dengan Pancasila oleh penguasa Orde Baru. Komentarnya kurang lebih begini: bila Syarikat Islam (SI) bisa dilihat sebagai “halaman pertama” sejarah partai politik Islam di Indonesia, maka apakah dengan pergantian asas Islam, PPP telah memulai “halaman terakhir” sejarah partai politik Islam?

Setelah 14 tahun, pertanyaan ini terjawab sudah. “Halaman berikutnya” dari sejarah partai politik Islam masih panjang. Munculnya masa reformasi seperti saat ini, yang telah membuka ruang dan kebebasan bagi lahirnya parpol-parpol baru, juga lahirnya partai-partai politik Islam. Termasuk mengubah asas partai dari Pancasila ke Islam. PPP kembali kepada asas Islam pada Mukhtar yang berlangsung pada 29 November-2 Desember 1998 di Pondok Gede. Dan semua itu menunjukkan bahwa saat ini justru “halaman baru” kebangkitan kembali partai-partai politik Islam telah dimulai.

Menyertai munculnya partai-partai baru yang hingga sekarang jumlahnya lebih dari 100 itu, tercatat beberapa partai yang secara resmi menyandang asas Islam seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat Islam (PUI), Partai Keadilan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Suni, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Syarekat Islam In-

donesia (PSII) dan Partai Kebangkitan Ummat (PKU). Selain itu masih terdapat dua partai politik berpotensi besar, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Mathori Abdul Jalil yang berada di bawah naungan kewibawaan tokoh karismatis KH. Abdurrahman Wahid, dan Partai Amanat Nasional (PAN) di bawah pimpinan tokoh Muhammadiyah Dr. Amin Rais. Meskipun kedua partai ini menyatakan diri sebagai partai terbuka dan inklusif, namun semua telah maklum bahwa keduanya terlahir dari, dan mengandalkan, massa pendukung yang berasal dari dua organisasi keagamaan Islam terbesar di negeri ini, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dengan demikian, absah jika dikatakan bahwa PAN dan PKB merupakan manifestasi pula dari gerakan politik Islam di Indonesia.

Sebagaimana terlihat di dalam kepengurusan partai-partai Islam pada tingkat pusat maupun daerah, keterlibatan tokoh-tokoh Islam di dalam gerakan kepartaian ternyata sangat besar. Sebagian besar para tokoh itu adalah para aktivis ormas-ormas Islam, yang mau tak mau akan mengikutsertakan pula ormas bersangkutan, berikut massa pendukungnya, meskipun secara tidak resmi dan tidak langsung. Bisa dikatakan bahwa hampir semua tokoh dan ormas Islam yang merupakan representasi dari gerakan Islam terjun dalam kancah partai politik. Dengan demikian, bandul gerakan Islam sedang bergoyang mengarah kepada satu sisi: yakni, politik.

Gerakan kultural

Dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia pada dasawarsa 80-an hingga berakhirnya era Orde Baru, pernah ditemui suatu pola gerakan yang cukup menarik. Dikatakan menarik karena memiliki landasan-landasan teologis yang kemudian berkembang menjadi diskursus gerakan yang berbeda dengan sebelumnya. Diskursus baru ini memunculkan praktek yang lain pula. Inilah yang oleh Donald K. Emmerson disebut sebagai diskursus Islam yang tengah menegaskan dimensi kulturalnya, jika bukan dimensinya yang sama sekali non-politis.¹

Diskursus ini lahir dalam konteks ketegangan ideologis antara Islam dengan negara yang terus berlanjut hingga era rejim Orde Baru. Ketegangan ideologis ini berekskalasi menjadi hubungan yang antagonistik antara Islam dan pemerintah yang berbuntut kekalahan politis umat Islam sedikitnya dalam lima bidang: konstitusi, pemilihan umum, fisik, birokrasi dan simbol. Selanjutnya, kekuatan politik formal Islam terkikis habis oleh berbagai kebijakan politik Orde Baru.

Sesungguhnya, persoalan ketegangan ini memiliki akar yang sangat dalam pada wilayah teologis. Yakni pemahaman agama yang menuntut penyatuan antara Islam dan negara. Keyakinan bahwa Islam adalah din sekaligus daulah ini menyebabkan setiap upaya “menghadirkan” Islam dalam kehidupan kenegaraan senantiasa menyebabkan berbagai benturan dengan konsep nation state, kedaulatan (*sovereignty*) dan nasionalisme yang dianut Indonesia. Pihak Islam menginginkan diberikan tempat yang lebih dari yang lain. Sementara negara kebangsaan menuntut perlakuan yang sama kepada semua agama di bawah payung Pancasila.

Ketidakharmonisan ini bisa kita amati melalui perjuangan oposisional-konfrontatif oleh gerakan Islam berupa upaya penguasaan dewan legislatif, pemuatan hukum-hukum Islam dalam konstitusi maupun perjuangan fisik. Sementara itu, pemerintah bersikap keras dan menghambat laju gerakan Islam. Gerakan Islam dimasukkan sebagai “ekstrim kanan” yang berhadapan dengan kepentingan nasional,



Sumber: Buku Sekilas Partai Keadilan

pemerintah memberlakukan kebijakan “pembonsaian Islam” dengan melemahkan “klaim mayoritas” Islam dengan menyuplai perkembangan Kristen dan Aliran Kebatinan, serta mengurangi jama’ah haji.² Selain itu, pemerintah juga melakukan pembersihan potensi politik formal Islam melalui berbagai rekayasa politik seperti ditolakny prakarsa para tokoh Islam modernis untuk melahirkan kembali Masyumi, berdirinya Parmusi sebagai pengganti Masyumi, fusi 5 partai Islam ke dalam PPP dan yang terakhir diwajibkannya PPP menanggalkan asas Islamnya dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Berbagai kebijakan ini ujung-ujungnya menyebabkan lumpuhnya kekuatan politik formal Islam.

Namun demikian dalam waktu yang sama telah terjadi perkembangan yang berlawanan pada wilayah non-formal, akibat ambivalensi kebijakan pemerintah. Di satu pihak menggambarkan bahwa sebagian kekuatan politik formal Islam telah berhasil digusur dari panggung politik oleh kebijakan “de-aliranisasi”, “de-ideologisasi” dan “de-konfessionalisasi” yang ditempuh pemerintah. Sedang di pihak lain, kekuatan politik non-formal berkembang dengan baik. Ambivalensi tersebut tampak jelas ketika pemerintah merekayasa peminggiran kekuatan politik formal Islam

dan pada saat yang sama pemerintah membutuhkan legitimasi umat Islam dalam mensukseskan program-program pembangunannya.

Kebutuhan akan legitimasi ini membuat pemerintah harus melibatkan kelompok-kelompok strategis khususnya kelompok Islam. Lebih dari itu, gerakan-gerakan Islam dengan responnya yang konstruktif memungkinkan tumbuhnya ketergantungan parsial pemerintah kepada gerakan-gerakan Islam. Ketergantungan itu semakin nyata ketika terjadi dinamika antara berbagai pusat-pusat kekuasaan (*power centers*) yang bercatur di tingkat nasional. Akibatnya, meskipun kekuatan politik formal Islam bisa dibilang habis, namun di pihak lain potensi gerakan-gerakan Islam sebagai kekuatan politik informal berkembang dengan baik. Lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan Islam dan kekuatan kepemimpinan informalnya semakin kuat.³

Pada bidang pendidikan yang berlangsung di kalangan umat Islam, bisa dikatakan konstan bahkan terjadi peningkatan. Buah dari peningkatan ini adalah terjadinya ledakan kaum terpelajar (*intellectual booming*) kaum santri yang memiliki kemampuan intelektual dan teknik tinggi, pada akhir 70-an, yang mendorong mobilitas kaum santri horisontal maupun vertikal.

Perubahan kondisi umat secara sosiologis ini melahirkan suatu generasi Islam dengan mutu intelektualitas lebih baik yang pada gilirannya melahirkan khasanah pemikiran Islam yang kaya dengan pemikiran segar baik dalam bidang teologi, politik dan sosial-ekonomi pada dekade 80-an. Beberapa tokoh tampil dengan pikiran-pikiran alternatif yang meramaikan diskursus intelektual pada masa itu. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, mereka mengemukakan fungsionalisasi ajaran-ajaran Islam guna mengatasi masalah-masalah kongkrit umat seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan struktural, kesenjangan sosial, dan sebagainya melalui piranti lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan dan ormas-ormas keagamaan.

Secara umum ide-ide mereka tidak lagi bersifat normatif dan doktriner. Tetapi lebih berorientasi

pada dimensi empiris dan realitas historis umat Islam Indonesia. Salah satu yang menonjol adalah perubahan paradigmatis pada soal-soal kebangsaan dan kenegaraan. Jika sebelumnya "Islamisasi Negara" dengan gagasan-gagasan ideologis-oposisionalnya menjadi orientasi dominan, maka oleh mereka hampir tidak pernah dikemukakan. Cita-cita berdirinya negara Islam melalui piranti partai-partai Islam tidak lagi menjadi arus utama. Pemikiran-pemikiran yang bermuatan ideologis ditempatkan sebagai bahan kajian semata. Sebagai derivasi dari gagasan ini, pemahaman keislaman yang toleran, dan menghargai pluralitas agama ditawarkan dengan berbagai aliran pemikiran masing-masing. Maka Islam ditempatkan bukan sebagai satu-satunya "cara hidup" yang mengatasi "cara hidup" yang lain, tetapi hanya sebagai salah satu varian dari sekian banyak pilihan. Oleh karena itu Pancasila diterima sebagai payung keragaman itu.

Pengalaman historis perjuangan politik formal yang selalu gagal, pergeseran sosiologis umat Islam serta perkembangan pada arasy pemikiran ini memberikan pengaruh yang besar khususnya pada perkembangan gerakan Islam. Pada fase ini, gerakan Islam lebih mengupayakan untuk mengerahkan kembali energi mereka dalam rangka mengembangkan sisi non-politis dari agama mereka. Mereka kemudian beralih ke dalam, menghindari dari perseteruan politik dengan golongan lain dan sesama rekan sendiri, dalam rangka menumbuhkan kesadaran keagamaan dan sosial para pengikutnya.⁴ Dengan demikian diharapkan umat Islam di Indonesia terlepas dari kekecewaan-kekecewaan politis yang dirasakannya dan secara kultural dan spiritual bisa berkembang pesat.

Yang juga bersifat inheren dalam pendekatan ini adalah asumsi bahwa dengan menonjolkan kembali kekuatan kultural Islam, dengan memperkokoh kesalehan religius para pengikutnya dalam pengertian yang paling luas, dan dengan mempertimbangkan kembali peran Islam di dunia moderen, maka sebuah Islam yang lebih simpatik dan lebih substantif, bisa dihadirkan. Diharapkan bahwa Islam yang seperti itu, dapat membantu mengakhiri tahun-tahun getir permusuhan dan saling kecurigaan politik antara Is-



Lambang-lambang partai dalam Pemilu 1955

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

lam dan negara.⁵

Pelan-pelan terjadi pengenduran orientasi ideologis dengan melunaknya tuntutan para aktivis Islam dalam perjuangan politik. Meskipun tentunya orientasi ideologis tidak hilang sama sekali di kalangan aktivis gerakan Islam, akan tetapi gagasan baru ini tetap memberikan pengaruh paling tidak terhadap pilihan-pilihan agenda perjuangan. Hal ini bisa kita amati pada munculnya apa yang disebut “Islamisasi negara non-konvensional”. Yaitu perjuangan politik yang bertujuan mengatur masyarakat dengan hukum Islam melalui piranti negara, akan tetapi dengan strategi yang lebih akomodatif, melunak, tidak konfrontatif dan lebih canggih.⁶

Berangkat dari “penyelesaian” hubungan yang janggal antara Islam dengan negara kebangsaan, dalam tubuh gerakan Islam telah lahir berbagai gerakan penguatan (*empowering*) masyarakat, penghargaan atas pluralisme, perjuangan HAM, penguatan *civil society* dan demokratisasi.

Menuju struktural

Gerakan Reformasi tampaknya telah menghadirkan perubahan yang “cukup signifikan”. Yang paling menonjol adalah perombakan undang-undang kepartaian yang memberikan peluang bagi warga negara untuk mendirikan partai politik. Peluang ini disambut oleh gegap-gempitanya deklarasi kelahiran partai-partai. Tidak ketinggalan kelompok-kelompok

yang merupakan aktor gerakan Islam. Mereka ramai-ramai membentuk partai politik dan kemudian sibuk membentuk kepengurusan, konsolidasi, dan sosialisasi, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Dicabutnya asas tunggal Pancasila juga menambah gairah kelompok Islam tertentu yang merasa penting untuk menonjolkan identitas keislamannya untuk berkiper di

partai. Maka dalam gerakan Islam yang ramai adalah kegiatan partai-partainya; bukan ormas-ormasnya atau lembaga sosial-pendidikannya. Pendek kata, politik telah menjadi pang-lima.

Hingga kini, kontroversi soal strategis atau tidaknya pendekatan politik-struktural melalui partai sebagai media gerakan Islam tetap saja berlangsung. Sebagian melihat bahwa gerakan Islam lebih menampakkan wujudnya yang strategis melalui gerakan kultural. Yakni gerakan keislaman yang memusatkan perhatiannya ke dalam, non-politis-struktural, mengutamakan aspek relijiusitas (kesalehan pribadi dan sosial), pengembangan sosial kemasyarakatan melalui pendidikan, upaya pemberdayaan dan pendidikan politik masyarakat, demokratisasi dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman sejarah sebelumnya, gerakan kultural yang ditempuh telah banyak berbuat untuk kehidupan bangsa. Termasuk soal menyediakan jalan keluar bagi persoalan laten hubungan Islam-negara. Acapkali gerakan ini mampu menjadi penekan yang cukup efektif memerankan fungsi kontrol sosial dan kontrol politik. Dengan kata lain, orientasi politis gerakan Islam dengan munculnya partai-partai dari kalangan Islam ini merupakan langkah mundur.

Di pihak lain, mereka berpandangan bahwa gerakan struktural yang sekarang ditempuh umat Islam merupakan kelanjutan dari atau bahkan sisi yang tak terpisahkan dari gerakan kultural yang pada masa lalu telah dilakukan. Cepat atau lambat kelompok Islam harus menempuh strategi struktural. Mereka pasti

tidak akan dapat menghindar dari “negara” sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan politiknya yang selama ini dipupuk melalui strategi kultural. Jika pada periode perjuangan kultural umat Islam membina “kebajikan sipil” (*civil virtue*) seperti sikap mandiri dan otonom, penghargaan atas pluralitas, penghormatan HAM, maka pada perjuangan melalui jalur struktural, mereka memiliki peluang untuk membawa kebajikan-kebajikan sipil itu ke dalam ruang negara. Pendapat senada mengatakan bahwa suatu perjuangan nilai bila tidak mempunyai posisi dan kekuasaan maka jalannya perjuangan tersebut tidak akan efektif dan membesar.

Selain alasan itu, dalam iklim politik yang sudah semakin terbuka seperti sekarang ini, aspirasi akan lebih efektif bila diperjuangkan lewat partai, bukan lewat saluran-saluran lain yang kurang “resmi”, seperti *lobby* dan negosiasi ekstra parlementer. Semakin suatu aspirasi dipertarungkan secara terbuka, adil dan *gentle* dalam arena yang dapat dikontrol oleh semua orang -seperti parlemen, misalnya- maka makin baik pula peri kehidupan politik suatu masyarakat. Dan sebaliknyaapun benar adanya. Salah satu kesalahan masa lalu, yang tak boleh diulang adalah bahwa karena sistem politik yang tertutup dan otoriter, umat Islam akhirnya memperjuangkan aspirasi politiknya secara sembunyi-sembunyi dan *lobby-lobby* yang tersembunyi dari mata publik. Akibatnya adalah tersebar rasa was-was dan cemburu di kalangan non-muslim.

Visi politik

Terlepas dari setuju atau tidak setuju, kita dihadapkan pada tantangan untuk mempertimbangkan secara bijaksana ke mana perjuangan partai-partai itu di arahkan dan bagaimana ia dikelola. Karena partai-partai ini akan ikut serta menentukan politik kenegaraan masa-masa mendatang, demokratis atau sebaliknya. Maka pertanyaan yang harus dicari jawabnya adalah apakah gerakan Islam politik yang sekarang bangkit lagi telah mengalami transformasi ataukah merupakan pengulangan apa adanya dari gerakan yang sama pada era sebelum 80-an? Untuk itu, gam-

baran mengenai wacana politik partai-partai tersebut perlu memperoleh perhatian. Namun persoalannya, wacana politik masing-masing partai ini masih dalam proses mencari bentuk dan karena itu belum bisa dibaca secara relatif gamblang. Keterbatasan informasi mengenai partai-partai ini juga menjadi kendala. Paling jauh kita hanya dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum yang belum menjelaskan banyak hal melalui AD/ART, brosur atau gagasan para tokohnya di media massa. Barangkali cara lain yang bisa menolong kita untuk “merab-raba” wacana masing-masing adalah dengan juga menelusurinya melalui wacana kelompok pendukung, paling tidak para tokohnya. Karena wacana politik partai-partai ini sebagian besar merupakan kontinuitas semata-mata dari wacana kalangan yang melahirkannya.

Terlepas dari setuju
atau tidak setuju, kita dihadapkan
pada tantangan untuk
mempertimbangkan
secara bijaksana ke mana perjuangan
partai-partai itu diarahkan
dan bagaimana ia dikelola.
Karena partai-partai ini akan
ikut serta menentukan politik
kenegaraan masa-masa
mendatang, demokratis
atau sebaliknya

Berbicara tentang wacana politik Islam untuk

kasus Indonesia bisa dikatakan terpusat dan berakar pada bagaimana “menghadirkan” Islam dalam nation state yang ternyata berbeda-beda. Yakni mengenai peranan yang seharusnya dimainkan oleh Islam dalam masalah-masalah umum negara sebagai konsekuensi logis dari keberadaan umat Islam sebagai mayoritas. Bertolak dari perbedaan cara pandang atas akar masalah ini, berbeda pula pandangan-pandangan tentang demokrasi, HAM, pluralisme, kebebasan, persamaan dan sebagainya. Bahkan dalam tataran praksis, ia telah menyebabkan perbedaan strategi, perbenturan kepentingan, konflik politik, bahkan perpecahan sosial.

Secara umum dan menggeneralisasi, setidaknya terdapat dua paradigma yang berkembang: Pertama, paradigma yang menginginkan diwujudkan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pranata negara. Dengan ungkapan lain, paradigma ini mencakup pandangan yang menghendaki –dalam istilah Mohtar Mas’oed- “islamisasi negara demi islamisasi masyarakat” baik dalam bentuknya

yang konvensional (konfrontatif-reaksioner) maupun yang lebih canggih. Biasanya, penganut pandangan ini sangat dekat dengan wacana Maududian, sebuah wacana yang secara kuat dipengaruhi gagasan Abul A’la Al-Maududi tentang konsep negara dalam Islam. Gagasan pokok Maududi yang sangat berpengaruh kepada pendukung paradigma ini antara lain adalah konsep *hakimiyyah lillah* (kedaulatan Allah). Di sini dikatakan bahwa kedaulatan adalah milik Allah bukan milik rakyat (manusia). Oleh karena itu, penyelenggaraan kehidupan suatu negara haruslah mengikuti apa yang dikehendaki Allah yang dituangkan melalui wahyu berupa syariah. Oleh karena itu, negara yang dikehendaki adalah negara Islam di mana produk hukumnya harus bersumber dari syariah. Selanjutnya, berkaitan dengan kememadaihan syariah sebagai acuan kenegaraan, Maududi menegaskan bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan; cara-cara ibadah, tuntunan moralitas dan tindakan, hubungan keluarga, urusan sosial dan ekonomi, pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, sistem

peradilan, hukum perang dan perdamaian, hubungan internasional dan sebagainya. Maka Islam adalah agama dan juga negara.⁷

Menurut para pengamat, kalangan pendukung Partai Keadilan yang berbasis di lembaga-lembaga dakwah dan masjid-masjid kampus sangat kuat memegang wacana Maududian ini.⁸

Masuk pula dalam paradigma ini apa yang oleh Mohtar disebut “islamisasi masyarakat dalam negara nasional”. Pandangan yang disebut terakhir ini mengemukakan bahwa Islam mampu menjadi sistem sosial yang terbaik yang bisa



Sumber: Dok. TEMPO

Hamzah Haz dan PPP-nya yang merubah asas dan lambang partainya.

menjamin demokratisasi yang sesungguhnya, kepatuhan yang ketat kepada hukum dan keadilan ekonomi. Singkatnya, kelompok ini mengidealkan terbentuknya masyarakat yang islami. Meskipun kelompok ini tidak menghendaki diwujudkan negara Islam, akan tetapi pada hakekatnya ia memilih tujuan akhir yang sama yakni: formalisasi ajaran lewat perangkat hukum. Dilihat dari wacana para pendukungnya serta pemikiran yang dimunculkan, PBB, PUI, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Sunni, PKU dan PNU termasuk pendukung paradigma ini. Tujuan politik yang ingin mereka capai adalah memperjuangkan Islam dengan berupaya mewujudkan penerapan syariah Islam di Indonesia bagi pemeluknya.⁹ Kebangkitan kembali semangat Piagam Jakarta.

Paradigma kedua berpandangan bahwa Islam seharusnya tidak menampilkan diri dalam bentuk eksklusif. Dalam hal ini, Islam tidak menampilkan warna keislamannya, tetapi mengintegrasikan kegiatannya dalam kegiatan bangsa secara keseluruhan. Tema-tema dan pilihan masalahnya adalah masalah yang dihadapi bangsa. Paradigmanya, “berangkat dari agama untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa”. Pandangan ini mengemukakan bahwa Islam berperan sebagai sumber inspirasi dan motifasi bukan sebagai dasar sistem sosial yang berlaku secara keseluruhan. Dalam konteks ini Islam bukan sebagai alternatif bagi sistem sosial yang lain namun, faktor pelengkap dari spektrum yang lebih luas dari faktor-faktor lain dalam kehidupan bangsa.

Implikasi praktis dari pandangan ini adalah komitmen yang kuat terhadap sebuah tatanan politik yang dihasilkan oleh proklamasi kemerdekaan di mana semua warga negara memiliki derajat yang sama tanpa memandang asal-usul, agama, ras, etnis, bahasa dan jenis kelamin. Konsekuensinya, politik umat Islam di Indonesia terikat kepada komitmen tersebut. Segala bentuk eksklusifisme, sektarianisme, dan privilege-privilege politik harus di jauhi. Termasuk di sini adalah pemberlakuan agama melalui negara dalam hukum formal, demikian juga ide proporsionalitas dalam perwakilan dalam lembaga-

Dengan demikian,
maka ide pembentukan
negara Islam maupun gagasan
pembentukan masyarakat islami
menjadi tertolak karena
pada hakekatnya dalam kedua ide itu
terdapat kesamaan tujuan yakni
formalisasi ajaran Islam lewat perangkat
hukum. Selanjutnya, tak perlu
ada masyarakat Islam
di negeri ini

lembaga negara. Karena tuntutan-tuntutan seperti ini berlawanan dengan asas kesetaraan bagi warga negara.

Dengan demikian, maka ide pembentukan negara Islam maupun gagasan pembentukan masyarakat islami menjadi tertolak karena pada hakekatnya dalam kedua ide itu terdapat kesamaan tujuan yakni formalisasi ajaran Islam lewat perangkat hukum. Selanjutnya, tak perlu ada masyarakat Islam di negeri ini, yang perlu diperjuangkan ummat Islam dalam politik adalah sebuah masyarakat Indonesia di mana terdapat “umat Islam yang kuat dalam pengertian berfungsi dengan baik” sebagai warga negara sebagaimana yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain. Dengan kata lain perjuangan umat Islam dalam politik seharusnya adalah perwujudan demokrasi.¹⁰

PKB dan PAN lebih dekat dengan pendekatan ini. PKB sebagaimana dinyatakan dalam mabadi' siyasahnya, menegaskan komitmennya kepada cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Di sini terdapat tiga hal prinsipal yang dikemukakan: Pertama, konsern partai ini kepada terciptanya sebuah masyarakat yang terjamin hak-hak asasi manusianya sebagaimana

ketentuan HAM universal maupun kulliyatul khams. Kedua, PKB menempatkan demokrasi sebagai pilar utama pengelolaan kekuasaan negara. Kekuasaan, menurut PKB merupakan amanat dari Tuhan, haruslah dikelola dengan baik karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikian juga, kekuasaan harus tidak memusat pada satu tangan serta berada pada mekanisme institusionalistik sehingga dapat dikontrol oleh rakyat. Ketiga, persamaan setiap warga negara di depan hukum adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan di tengah bangsa yang sangat pluralistik ini. Atas dasar kesadaran akan pluralisme dan persamaan inilah PKB menekankan Pancasila sebagai nilai luhur yang mesti dipegangi. Ia sama sekali tidak menyebut penerapan nilai-nilai Islam, syaria Islam, maupun pembentukan masyarakat islami sebagai tujuannya. Dan atas dasar ini pula PKB menyatakan diri sebagai partai terbuka yang mengorientasikan visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinannya kepada seluruh warga bangsa apapun agama, ras, suku dan golongannya.¹¹

Namun terdapat catatan yang perlu diingat bahwa dalam tubuh PKB –walaupun pada tingkat elit partai yang dominan adalah mereka yang berpendekatan ini, akan tetapi masih banyak para tokoh yang lebih dekat dengan pendekatan pertama khususnya pada level daerah.

Visi dan orientasi politik PAN banyak persamaan dengan PKB. Sebagaimana terlihat dalam AD dan ART-nya, PAN merupakan partai politik yang bersifat terbuka, majemuk dan mandiri. Perjuangan PAN lebih diorientasikan kepada kepentingan bangsa secara lebih luas seperti perwujudan kedaulatan rakyat, demokratisasi, perlindungan HAM, penegakan hukum, kebebasan pers, pemerataan ekonomi, otonomisasi, civil society, pemerintahan yang bersih dan sebagainya.¹² Meskipun PAN tidak sama sekali menyebut-nyebut Islam maupun mencita-citakan pelaksanaan syariat Islam melainkan lebih berbicara dalam kerangka demokratisasi dalam masyarakat yang plural, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah wacana pemikiran yang dianut oleh Amin Rais, Ketua Umum PAN, yang pada masa lalu mencerminkan

wacana pertama.¹³ Selain itu para tokoh PAN di daerah juga banyak yang masih kental dengan wacana pertama. Namun, sebagaimana dikabarkan oleh beberapa pengamat, telah terjadi perubahan frontal pada pemikiran Amin Rais dan kini lebih merupakan perwujudan dari pendekatan kedua.¹⁴

Meskipun terdapat varian pendekatan sebagaimana di atas, gejala umum yang timbul, tampaknya, kesadaran akan toleransi dan penghayatan pada penghargaan pluralitas mulai tumbuh meski dalam fase yang berbeda-beda. Hal ini bisa kita amati dari dominannya penolakan terbentuknya negara Islam di Indonesia. Kesimpulan ini juga bisa kita tarik dari perbandingan jumlah konstituen yang dimiliki oleh dua varian pendekatan di atas. Berdasarkan pengamatan sementara, pendukung PKB dan PAN jauh lebih besar daripada partai-partai Islam yang lain. Dengan demikian, mayoritas pelaku gerakan Islam adalah mereka yang menolak segala bentuk privilege untuk Islam dan dengan demikian semakin terjamin persamaan warga negara sebagai bagian penting kehidupan demokrasi.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan berarti antara Partai Islam saat ini dengan partai Islam yang ada beberapa puluh tahun yang lalu.¹⁵ Dalam ungkapan lain, Islam politik, kini telah merubah formatnya dari pola legalistik/formalistik ke pola sub-stansialistik. Sebuah jenis Islam politik yang dapat mentransendensikan diri dari kepentingan-kepentingan formalistik, legalistik dan eksklusif dan lebih berusaha mencapai kepentingan-kepentingan yang lebih substantif, integratif dan inklusif. Walaupun ada yang tidak secara terang-terangan menolak bentuk-bentuk Islam politik yang legalistik, Islam politik baru ini memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang semakin tidak relevan.¹³ Bisa jadi hal ini merupakan pengaruh dari pola “gerakan Islam Kultural” pada masa sebelumnya, sebagaimana diprediksi oleh Emerson bahwa ketika Islam memasuki politik kembali umat Islam mungkin dapat melepaskan diri dari beban-beban keyakinan yang tertutup dan harapan-harapan yang tak realistis.¹⁴ Dari sini dapat dikatakan bahwa masa depan demokrasi di Indonesia dapat di-

prediksi dalam perspektif yang optimistik.

Demokrasi: *the ultimate goal*

Sebagai partai yang tumbuh dari ladang gerakan Islam, partai-partai Islam bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan pendukungnya. Sementara, jika kita mau berpikir jernih, persoalan yang dihadapi umat Islam sekarang ini bukanlah persoalan formalisasi ajaran agama atau tidak, melainkan ancaman otoritarianisme penguasa. Berdasarkan pengalaman Orde Baru, biang keladi kehancuran bangsa Indonesia sesungguhnya adalah sistem politik yang menyebabkan lahirnya kekuasaan yang tak terkontrol. Bukan soal "Islam" atau "sekuler". Bahkan kenyataan masa itu menegaskan bahwa islamisasi birokrasi, fenomena "ijo royo-royo", Bank Syariah, akomodasi hukum-hukum Islam seperti UU Perkawinan, UU Pendidikan Nasional dan sebagainya yang berbasis simbolisme—yang telah menguras energi umat—bukanlah agenda terpenting. Gerakan Islam pada masa itu telah salah menempatkan skala prioritas dengan mengutamakan islamisasi dan menganaktirikan demokratisasi. Dan kita merasakan hasilnya; penderitaan berkepanjangan yang dialami rakyat Indonesia. Sekarang ini sesungguhnya kita menghadapi masalah yang sama mengingat sangat dominannya kekuatan warisan Orde Baru. Dengan demikian, agenda terpenting bangsa adalah memperjuangkan tegaknya demokrasi. Maka tantangan partai-partai Islam adalah demokratisasi.

Tantangan partai islam

Lebih dari partai yang lain, partai politik yang berasal dari komunitas gerakan Islam, baik yang memaknai Islam sebagai landasan ideologinya, maupun bukan, membawa peran yang rumit, yakni sebagai institusi yang membawa misi spiritual ke dalam praktek politik yang biasanya bersifat profan. Sebagai institusi yang berbasis pada *spiritual community* (komunitas spiritual), maka tugas partai-partai itu adalah mengusahakan agar keharusan doktrin keagamaan dapat memperoleh tempat yang "semestinya" dalam konteks politik kenegaraan. Akan tetapi, dengan ber-

jalannya waktu, maka visi perjuangan dan program-program partai yang disusun berdasarkan doktrin agama, bisa saja tersisihkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik praktis.¹⁵ Bisa jadi mereka terjebak pada politik pragmatisme dan utilitarian.

Selain itu, persoalan juga akan muncul pada soal "cara" partai tersebut memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. "Cara" menjadi persoalan krusial karena partai politik sesungguhnya adalah sebuah institusi moderen dalam masyarakat yang menganut paham demokrasi, bukan sebagai institusi keagamaan dalam suatu sistem kemasyarakatan yang masih terikat pada traditional religio-political system, suatu sistem kemasyarakatan di mana tidak ada pemisahan antara komunitas politik dengan komunitas keagamaan. Dengan demikian, kepasrahan total komunitas keagamaan tertentu pada suatu partai tidak lagi bisa diharapkan. Sebagai institusi moderen dalam masyarakat penganut paham demokrasi, partai politik merupakan produk dari perkembangan demokrasi dan demokrasi moderen produk dari persaingan partai.

Oleh karena itu mau tidak mau partai Islam harus menyatakan dirinya sebagai partai politik dalam arti moderen. Dan di sana ada tantangan untuk melakukan penyesuaian struktural, baik dalam sistem maupun manajemen partai, maupun (terutama) dalam logika kerjanya yang melihat politik sebagai suatu power game. Berbeda dari kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan perkumpulan sosial lainnya, partai politik memiliki logikanya sendiri yang intinya kekuasaan: mempengaruhi, mendapatkan, memperbesar atau mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks itu yang berlaku adalah idiom dan logika politik seperti strategi, taktik, manuver, kontra manuver, mobilisasi, *pressure*, bahkan konflik. Secara kongkrit, semua idiom dan logika politik itu akan terpantul secara jelas selama berlangsung kampanye dan pelaksanaan pemilihan umum sebagai arena pertarungan untuk meraih kekuasaan. Selama kampanye, setiap partai akan berusaha sekuat-kuatnya untuk *to get out the vote* (untuk meraup suara sebanyak-banyaknya) dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bisa menyimpang dari aturan hukum dan eti-

ka.¹⁶ Oleh karena itu, menerapkan moral agama (*akhlak al-karimah*) dalam proses politik yang demikian merupakan tantangan yang berat dan jika gagal akan sangat kontra produktif dengan cita-cita gerakan Islam.

Seperti uraian di atas, partai politik pada hakekatnya merupakan institusi demokrasi. Oleh karena itu, partai politik, apapun landasan ideologisnya, memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan fungsinya sebagai wahana kehidupan yang demokratis. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk merubah tradisi kepartaian kita. Budaya dan sistem kepartaian sekaligus.

Pada masa lalu, fungsi dan peranan partai di tengah masyarakat politik nyaris tak dijumpai bahkan terkesan dijungkir balik. Misalnya, fungsi partai sebagai sarana sosialisasi politik rakyat ternyata diblokkan sedemikian rupa menjadi sarana sosialisasi kepentingan pihak penguasa. Hal yang sama berlaku pula untuk fungsi-fungsinya yang lain. Maka jarak antara partai politik dan publik kian renggang dan tak terjembatani. Sebaliknya, jarak politik antara partai dengan elite penguasa semakin reduktif.

Jika kondisi seperti ini tidak diubah, perilaku politik yang dimunculkan partai menjadi tidak lebih sebagai pemburu kekuasaan. Aktifitas yang ia lakukan sebatas dalam rangka meraih kekuasaan formal kenegaraan (*public office*). Partai politik akhirnya hanya identik dengan hiruk pikuk pemilu (*general election*). Di luar ritus politik tersebut, partai politik akan tak berperan dan cenderung apatis pada persoalan masyarakat. Lebih fatal lagi, ketika para aktivis parpol telah menjadi wakil rakyat, kebijakan-kebijakan yang dibuat atau disetujui justru akan banyak merugikan dan memojokkan rakyat. Dampaknya, rakyat pada umumnya akan semakin lemah dan dilemahkan secara politis.

Di sisi yang lain, sistem kepartaian yang sarat rekayasa dan tidak menyediakan ruang kompetisi yang fair ini semakin mengkerdalkan partai. Dalam sistem semacam ini, amat sulit mengharapkan munculnya partai politik yang organik, yakni partai yang

programatik yang lahir dari massa bawah dan berorientasi untuk membangun *civil society*. Problem memunculkan partai organik karenanya bersumber dari dua hal, yakni budaya dan sistem kepartaian sekaligus.

Pada Orde Reformasi ini, peluang untuk perubahan terbuka lebar. Maka harapan agar partai politik bisa kembali menjadi tulang punggung rakyat memunculkan momentumnya. Paling tidak, undang-undang tentang kepartaian sekarang relatif memberikan peluang bagi terwujudnya sistem kepartaian yang *fair play*. Dengan demikian, tantangan terbesar kini lebih pada membangun budaya kepartaian yang kondusif bagi maksimalisasi fungsi-fungsi partai dalam kerangka demokrasi.

Dalam konteks inilah cukup mendesak untuk mengembalikan partai politik sebagai partai politik organik. Ada beberapa hal penting yang patut ditelaah berkaitan dengan watak partai politik organik yang sudah tentu pula bersifat moderen.¹⁷

Dari segi fungsi keanggotaannya, partai organik harus berorientasi pada penyadaran dan pembebasan belenggu politik publik. Tugas semacam ini agaknya lebih mungkin terlaksana lewat pembentukan sebuah partai kader. Ciri-ciri umum dari partai ini adalah adanya disiplin ketaatan organisasi, serta cenderung sistematis dan berkelanjutan dalam kiprah. Selain itu, ikatan serta kualitas edukatif para anggotanya lebih diprioritaskan ketimbang massifikasi pendukung. Dan mereka yang telah terdidik dan mumpuni inilah yang pada akhirnya dijadikan duta-duta kesadaran politik ke tengah masyarakat. Jika keanggotaan suatu partai berawal dari ikatan-ikatan primordial, sebagaimana terjadi pada sebagian besar partai Islam, perlu ditindaklanjuti dengan pendidikan dan penyadaran sehingga tidak melahirkan kepasrahan dan loyalitas membuta kepada partai. Hal ini penting karena pada masa lalu, partai turut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kebisuan dan kebutaan politik rakyat.

Kebiasaan yang sering muncul dalam pemilu masa Orba adalah tekanan pada mencari sebanyak-banyaknya massa pendukung, sehingga verbalisme

dan retorika kampanye tidak terhindarkan. Untuk kasus partai berbasis massa muslim, eksploitasi ajaran agama untuk kepentingan verbalisme dan retorika sudah saatnya dihentikan. Jika tidak, agama akan terperosok semakin dalam di tengah arus penipuan massal. Dampak yang paling terasa dari semua itu adalah rakyat kebanyakan semakin tenggelam dan terbiasa dengan semua bentuk kebohongan. Dalam hal ini, peranan partai lebih dominan untuk merangsang imajinasi reseptif, dan konsumtif massa. Akibatnya terjadi pendangkalan imajinasi yang kreatif serta penumpukan sensibilitas politik. Rakyat semakin bersikap apolitik dan apatis (*silent majority*) yang ada gilirannya akan turut memperkuat pelestarian legitimasi pihak penguasa. Karenanya sebuah partai harus menjadikan dirinya sebagai guru konfessionis pencerahan kesadaran massa.

Watak lain partai organik adalah sifatnya yang terbuka dan egaliter. Bila di era Orba keberadaan partai cenderung tertutup dan diskriminatif kini sebuah partai harus mandiri, membuka diri, serta siap menampung tanpa diskriminasi segenap personal maupun aspirasi yang dilontarkan dari berbagai kalangan. Dengan kata lain, platform yang harus dimiliki sebuah partai moderen organik adalah lintas perbedaan baik agama, etnis, budaya, gender dan sebagainya. Dalam konteks ini, sebuah partai yang berasaskan Islam misalnya, harus bersikap akomodatif dan responsif kepada siapapun. Segala perjuangan yang dilakukannya harus diletakkan dalam kerangka kepentingan bangsa.

Kiprah dan strategi partai harus bersifat programatik. Hal ini bisa terjadi jika kepentingan yang digariskan dalam platform partai tidak hanya sekadar iming-iming politik bagi public dan cenderung utopis. Oleh karena itu, janji-janji yang dilontarkan dalam kampanye sudah merupakan rencana program yang memang telah diolah secara matang dan akan bisa dilaksanakan. Dus, slogan dan janji-janji tidak hanya diletakkan sebagai latar dari hasrat meraih suara pemilih. Karena jika tidak demikian, jelas-jelas merupakan paradoks dengan fungsinya sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat.

Partai politik harus melakukan identifikasi diri terhadap kepentingan publik yang yang paling mendasar. Untuk ini, jarak antara partai dan masyarakat harus dieliminasi. Secara sistematis, partai politik harus berakar hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah, sampai ke pelosok dan desa-desa terpencil sekalipun.

Sebutan "partai adalah rakyat" tidak hanya selesai di tingkat slogan, alias mesti dibuktikan secara kongkrit. Strategi yang dijalankan bukan lagi bermuara pada agregasi massa demi kemenangan suara dalam pemilu yang otomatis akan meraih suara mayoritas di parlemen. Tapi dibentangkan tanpa batas waktu dan jarak melalui misalnya intensifikasi penyelenggaraan agenda diskusi publik ataupun berbagai tindakan praktis yang emansipatif. Pendek kata, orientasi struktural hendaknya bersifat sekunder dihadapan signifikansi orientasi kultural. Walaupun program struktural tergolong penting (mengingat pengakuan administratif dari negara secara formal tak bisa diabaikan) minimal target yang diraih dalam hasil pemilu adalah memperoleh suara untuk mendelegasikan dirinya sebagai partai oposisi.

Dari segi kepemimpinan, pucuk kepemimpinan partai harus memiliki kualifikasi sesuai dengan situasi kekinian, berwawasan demokratis, futuristik, pluralis serta memiliki *moral force* yang mendalam. Kapabilitas, kapasitas, serta integritas dirinya telah teruji secara matang oleh dinamika sejarah dalam berbagai konteks. Pemimpin partai ideal secara mendasar harus memiliki kepekaan dan kemampuan intelektual dalam menerapkan manajemen politik bervisi kerakyatan.

Yang tidak kalah pentingnya dari karakteristik yang diurai diatas, pola kampanye dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan sarana publik serta diupayakan untuk mengurangi berbagai bentuk mobilisasi massa ke jalan-jalan. Di samping sarat dengan pendidikan politik rakyat, model kampanye demikian akan mengurangi resiko terjadinya tindak kekerasan akibat persaingan antar partai. Dalam situasi seperti sekarang di mana telah terjadi krisis kepercayaan dalam masyarakat (*social distrust*) yang mengakibat-

kan kerawanan terjadinya berbagai konflik tidak saja vertikal tetapi juga horisontal. Hal ini menjadi sangat urgen.

Melalui perubahan sistem dan budaya kepartaian, harapan yang dibebankan pada partai politik Islam sebagai wujud gerakan Islam untuk memperjuangkan demokrasi menjadi proporsional. Dan yang terpenting dari perjuangan bangsa Indonesia termasuk gerakan Islam adalah terselenggaranya sistem kenegaraan yang demokratis.

M. Imdadun Rahmat, Ulil Abshar Abdalla, Syafiq Hasyim, dan A. Suaedi

Catatan:

¹ Donald K. Emmerson, "Islam and Regime in Indonesia" hal. 16 sebagaimana dikutip dalam Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 46-47.

² Dewi Fortuna Anwar, "Kaabah dan Garuda: Dilema Islam di Indonesia", *Prisma* No. 4, April 1984, Tahun XII, hal. 14.

³ Abdurrahman Wahid, "Islam, Negara dan Demokratisasi", dalam Arief Afandi, (ed.), *Islam Demokrasi Atas-Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 107.

⁴ Donald K. Emmerson, op.cit. hal 46.

⁵ Bahtiar Effendi, op. cit., hal. 46

⁶ Mohtar Mas'od, "Islamisasi Negara Dan Islamisasi Masyarakat", dalam Arief Affandi, op. cit. hal. 76-77.

⁷ Ulasan lebih lengkap bisa dibaca di Charles J. Adams, "Maududi Dan Negara Islam" dalam John L. Esposito (ed), "Dinamika Kebangunan Islam" (Jakarta: Rajawali Press, 1987) hal. 128-157.

⁸ Meskipun diungkapkan secara samar, wacana Maududian ini bisa kita tangkap dalam Nur Mahmudi Ismail, "Jatidiri Partai Keadilan", dalam Sahar L. Hassan dkk. (ed.), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 29-58. Sebagian besar pendukung partai ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan model gerakan yang dikembangkan oleh pemimpin Ikhwanul Muslimun di Mesir Sayyed Quthb. Di mana Sayyid Quthb sendiri sangat mengagumi Maududi dan menjadi corong pemikiran-pemikirannya.

⁹ Perhatikan, misalnya, Deliar Noer, ketua umum PUI mengemukakan supaya kita mempertimbangkan tuntutan kelompok Islam agar bagi mereka yang muslim diberlakukan hukum Islam, pada sebuah tulisannya di Kompas, dengan judul "Politik Islam". PKU bahkan menegaskan bahwa tujuan

husus partai ini adalah mempertahankan dan memperjuangkan masuknya nilai-nilai Islam yang relevan ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Lihat, Salahuddin Wahid, "Khittah Perjuangan Partai Kebangkitan Umat" dalam Sahar L. Hassan dkk. (ed.), op. cit. hal 69. Sedangkan PNU dan Partai Sunni memiliki kecenderungan yang sama dengan PKU. Untuk kasus PBB dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, bisa kita amati lewat kecenderungan utama konstituennya. Dua par-tai ini sama-sama lahir dari Keluarga Besar Bulan Bintang yang konstituen utamanya adalah para pendukung Masyumi yang sangat kukuh memegang cita-cita penerapan hukum Islam. Meskipun Yusril Ihza Mahendra berusaha meminimalisir ke-cenderungan ini dan tampil dengan lebih moderat, namun diragukan keberhasilannya.

¹⁰ Dua varian pendekatan di atas, dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid dalam Abdurrahman Wahid, op. cit, hal. 133.

¹¹ Lihat "Dokumen Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa", diterbitkan oleh DPW PKB Jawa Timur, hal 41-47.

¹² Lihat "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional", Jakarta 1998, hal. 2-6.

¹³ Lihat Umaruddin Masdar, "Pemikiran Asli Amien Rais", *Kompas*, Jum'at, 18 Desember 1998. Amin Rais pada masa sebelum Reformasi sangat intens menyuarakan terwujudnya masyarakat Islami dan juga menghendaki "government representativeness" dan representasi umat Islam dalam lembaga per-wakilan. Lihat M. Amin Rais, "Representasi Umat Harus Diperjuangkan", dalam Arief Afandi, op.cit. hal. 122.

¹⁴ Perubahan pemikiran Amien Rais pernah dikemukakan oleh Hajrianto Y Thohari dalam tulisannya di Kompas pada tanggal 24 September 1998 dengan judul "Politik Islam Generasi Baru Jilid Dua". Oleh Umaruddin Masdar, hal ini diragukan. Lihat *ibid*.

¹⁵ Menurut Salahuddin Wahid, perbedaan itu antara lain: pertama, partai Islam saat ini tidak lagi memperjuangkan Islam menjadi dasar negara, tidak menginginkan adanya negara Islam di bumi Indonesia. Kedua, Para tokoh partai Islam saat ini umumnya lebih toleran terhadap agama lain dan menginginkan terwujudnya kerukunan beragama. Ketiga, secara nasional, para tokoh dan pimpinan partai Islam saat ini rata-rata lebih baik tingkat pendidikannya dan wawasan kebangsaannya cukup baik. Lihat, Salahuddin Wahid, "*Partai (Berdiri) Islam di dalam Bangsa yang Majemuk*", *Kompas*, 18 Desember 1998.

¹³ Bahtiar Effendi, op. cit., hal. 58.

¹⁴ Donald K. Emmerson, "Islam and Regime in Indonesia" hal. 168, sebagaimana dikutip dalam Bahtiar Effendy, op.cit. hal. 46.

¹⁵ Manuel Kaisiepo, "PPP Menyongsong Era Baru Persewaan Isi "Halaman Baru" Parpol Islam", *Kompas*, Minggu 29 November 1998.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Tentang ciri-ciri partai organik pernah diutarakan oleh Dede Azwar Nurmansyah, dalam Dede Azwar Nurmansyah, "Saatnya Parpol Dikembalikan Kepada Rakyat", *Media Indonesia*, Jumat, 4 Desember 1998.